



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IR.I KETUT SEDANA MERTA, ST., MT..
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 19895

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.470.000.000

1. Tanah Seluas 82 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, WARISAN Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, WARISAN Rp. 770.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/400 m2 di KAB / KOTA KARANGASEM, WARISAN Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 181.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA GL 100 Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000



5. MOTOR, KAWASAKI EX 250 I Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

6. MOTOR, YAMAHA V 110 ZNE Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 93.308.780

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 680.098.072

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.424.906.852

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.424.906.852

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.